

Analisis *Framing* Pemberitaan Kasus Korupsi Tom Lembong dalam Bingkai Media *Online* Antaranews.com dan Tempo.co

Eric Raynaldo Handy Saputra ^{1*}, Hanna Nurhaqiqi ²

^{1,2} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

article info

Article history:

Received 30 June 2025

Received in revised form

20 July 2025

Accepted 10 September 2025

Available online January

2026.

Keywords:

Corruption; Framing Analysis;

Tom Lembong; Legal

Politicization.

abstract

This study analyzes the framing of news coverage on the alleged corruption case involving Tom Lembong related to the 2015 sugar import policy, as reported by Antaranews.com and Tempo.co. The case drew attention because it involved a political figure in opposition to the government, raising suspicions of legal politicization ahead of the 2024 elections. This research aims to examine how both media outlets framed the case. Antaranews.com and Tempo.co were chosen due to different ownership structures: Antaranews.com is state-owned under BUMN, while Tempo.co is privately and publicly owned. The study uses Robert Entman's framing analysis model, covering four elements: define problems, diagnose causes, make moral judgments, and treatment recommendations. The findings are connected to Michel Foucault's theory of power relations. News articles were collected using the keyword "Tom Lembong" from October 29 to November 30, 2024, yielding 51 articles from Antaranews.com and 154 from Tempo.co. These were further filtered by stages of the case: suspect naming, political responses, pretrial & alleged politicization, and pretrial rejection. From this, 5 articles from Antaranews.com and 6 from Tempo.co were selected as the most representative. The results show clear differences. Antaranews.com emphasizes the legality of the Attorney General's actions, supports the legitimacy of the legal process, and relies on official sources. Meanwhile, Tempo.co frames the case more critically, questioning the legal process and highlighting broader political narratives. These differences reflect power relations that influence media framing according to ownership.

abstract

Kata Kunci:

Korupsi; Analisis Framing;

Tom Lembong; Politisasi

Hukum.

Penelitian ini menganalisis framing pemberitaan kasus dugaan korupsi Tom Lembong terkait kebijakan impor gula tahun 2015 di portal berita online Antaranews.com dan Tempo.co. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan tokoh oposisi pemerintah dan memunculkan dugaan politisasi hukum menjelang Pemilu 2024. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedua media tersebut membungkai pemberitaan kasus Tom Lembong. Antaranews.com dan Tempo.co dipilih karena memiliki perbedaan kepemilikan; Antaranews.com dinaungi BUMN, sedangkan Tempo.co dimiliki perusahaan swasta dan publik. Metode yang digunakan adalah analisis framing model Robert Entman dengan empat elemen: define problem, diagnose causes, make moral judgment, dan treatment recommendation. Hasil analisis dikaitkan dengan teori relasi kuasa Michel Foucault. Data berita dikumpulkan dengan kata kunci "Tom Lembong" pada periode 29 Oktober hingga 30 November 2024, menghasilkan 51 berita dari Antaranews.com dan 154 berita dari Tempo.co. Selanjutnya, berita disaring kembali berdasarkan tahapan pemberitaan kasus, yaitu penetapan tersangka, respon politisi, praperadilan & dugaan politisasi, serta penolakan praperadilan. Berdasarkan tahap tersebut, dipilih 5 berita dari Antaranews.com dan 6 berita dari Tempo.co yang paling kuat merepresentasikan framing di setiap tahapan. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang jelas. Antaranews.com lebih menekankan legalitas tindakan Kejaksaan Agung dengan narasi mendukung legitimasi proses hukum dan banyak mengutip sumber resmi. Sebaliknya, Tempo.co membungkai kasus lebih kritis, mempertanyakan proses hukum dan membuka ruang narasi politik. Perbedaan ini mencerminkan relasi kuasa yang memengaruhi konstruksi pemberitaan sesuai kepemilikan media.

Corresponding Author. Email: raynaldoeric@gmail.com ^{1}.

Copyright 2026 by the authors of this article. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITINFO dan RISET). This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 

1. Pendahuluan

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Indonesia, Thomas Trikasih Lembong, berkaitan dengan kebijakan impor gula kristal mentah (GKM) yang diberikan kepada perusahaan swasta saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2015-2016. Penetapan Tom Lembong sebagai tersangka pada 29 Oktober 2024 menarik perhatian publik, terutama karena adanya dugaan *politisasi* dalam proses hukum tersebut. Dugaan ini semakin kuat karena Tom Lembong pernah menjadi bagian dari tim pemenangan Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden 2024. Penetapan tersangka yang dilakukan bertahun-tahun setelah kebijakan tersebut diterbitkan menimbulkan pertanyaan publik. Hal ini memicu beragam respon, baik dari masyarakat maupun media, yang secara terus-menerus memberitakan perkembangan kasus ini. Dugaan korupsi yang menjerat Tom Lembong berawal dari hasil rapat koordinasi pada 2 Mei 2015 yang menyimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula dan tidak memerlukan impor.

Meskipun demikian, Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan Indonesia saat itu tetap menerbitkan izin impor gula kristal mentah kepada PT AP, sebuah perusahaan non-BUMN, tanpa melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait dan tanpa rekomendasi dari kementerian teknis. Tindakan tersebut melanggar Peraturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 51 Tahun 2004 yang secara tegas menyatakan bahwa impor gula hanya dapat dilakukan oleh perusahaan BUMN. Selanjutnya, pada 28 Desember 2015, rapat koordinasi bidang perekonomian memprediksi potensi kekurangan gula nasional. Menindaklanjuti hal tersebut, PT PPI (Perusahaan Perdagangan Indonesia) sebagai perusahaan BUMN berkoordinasi dengan delapan perusahaan swasta yang hanya memiliki izin untuk mengelola gula rafinasi. Namun, dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan tersebut mengelola gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. Gula hasil pengolahan tersebut kemudian dijual kepada masyarakat melalui distributor terafiliasi dengan harga Rp16.000 per kilogram, melebihi harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp13.000 per kilogram. Dalam konferensi pers, Kejaksaan Agung

menjelaskan bahwa PT PPI mendapatkan keuntungan sebesar Rp105 per kilogram dalam praktik tersebut, yang menjadi bagian dari penyelidikan dalam penetapan tersangka Tom Lembong (Sari, Shabrina, Ristiyanti, & Abdurrahman, 2025). Kasus hukum yang menjerat Tom Lembong tidak hanya dipandang sebagai persoalan hukum semata, tetapi juga berkaitan dengan dinamika politik yang terjadi. Dinamika politik ini bermula dari dugaan adanya *politisasi* terhadap penetapan tersangka Tom Lembong. Hal ini dipicu oleh latar belakang Tom Lembong yang menjadi bagian dari tim pemenangan Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden 2024. Tom Lembong juga memiliki rekam jejak yang berseberangan dengan pemerintahan Jokowi dan pasangan Prabowo-Gibran. Hal ini tercermin pada sikap Tom Lembong dalam perdebatan terkait kebijakan ekonomi, terutama penghiliran nikel. Debat antara calon presiden 2024, Gibran, saat itu menyebutkan langsung nama Tom Lembong dan mengkritik kebijakan ekonomi masa lalu. Hal ini memperjelas posisi Tom Lembong sebagai oposisi dari pemerintahan sekarang. Oleh karena itu, muncul spekulasi bahwa proses hukum yang menjerat Tom Lembong tidak terlepas dari dinamika politik (Prayogi & Chandra, 2024).

Indonesia masih menghadapi angka korupsi yang cukup tinggi. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch tahun 2023, kasus korupsi di Indonesia mengalami peningkatan dari 271 kasus pada tahun 2019 menjadi 791 kasus korupsi pada tahun 2023, yang didominasi oleh pejabat negara. Pejabat negara yang seharusnya menjadi penggerak utama dalam pemerintahan yang bersih dan melayani masyarakat, justru menjadi penyumbang kasus korupsi terbanyak dibandingkan profesi lainnya. Menurut laporan Indonesia Corruption Watch tahun 2023, kasus korupsi didominasi oleh profesi kepala daerah, pegawai pemerintah, dan anggota legislatif (Anandy & Ramadhana, 2024). Menurut McQuail dan Deuze (2020), produk media berupa berita merupakan konstruksi selektif yang terdiri dari potongan-potongan informasi faktual dan pengamatan yang kemudian disatukan dan diberi makna melalui *bingkai* tertentu, sudut pandang, atau perspektif tertentu. Perbedaan *framing* dalam pemberitaan dapat memengaruhi cara pandang publik terhadap kasus tersebut. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, tetapi juga dapat menjadi

instrumen *relasi kuasa* yang memengaruhi publik terhadap sebuah peristiwa yang dikonstruksi. Pada portal berita, penyebaran informasi dapat dimuat melalui teks, audio, maupun gambar yang memiliki makna tersendiri bagi pembaca berita tersebut. Pemahaman dan persepsi terhadap dunia dapat bergantung pada sudut pandang atau *framing* sebuah pemberitaan. *Framing* merujuk pada cara media membentuk sudut pandang tertentu dalam sebuah peristiwa (Alrizki & Aslinda, 2022). Michel Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga progresif melalui bahasa yang digunakan dalam interaksi. Media dapat menciptakan hal tersebut dan menyebarkan berita yang sudah dikonstruksi melalui pemilihan fakta, sudut pandang, maupun cara penyajian berita. Sebagai bagian dari instrumen *relasi kuasa*, media memiliki kemampuan untuk menggiring opini publik dan membangun narasi melalui berita yang diterbitkan guna mempengaruhi masyarakat (Barasa & Riyanto, 2023). Struktur kalimat, penggunaan kata, dan narasi dalam pemberitaan media dapat membawa makna ideologis tertentu sehingga dapat mempengaruhi sudut pandang masyarakat (Darmadi, 2022). Dalam pembingkaiannya kasus Tom Lembong, media memiliki cara tersendiri dalam membungkai realitas yang disajikan kepada audiens.

Robert Entman menjelaskan bahwa *framing* media bekerja dengan menonjolkan aspek tertentu dari sebuah peristiwa guna membentuk interpretasi tertentu di benak khalayak (Setiaji, 2014). Portal berita yang memiliki kepentingan dan latar belakang tertentu dapat memengaruhi bagaimana sebuah berita dikonstruksi. Antaranews.com dan Tempo.co adalah dua portal berita yang turut memberitakan kasus Tom Lembong dengan karakteristik yang berbeda. Kepemilikan media Tempo.co dimiliki oleh beberapa perusahaan melalui saham di PT Grafiti Pers, dengan pemegang saham di antaranya Yayasan Tempo 21 Juni 1994, PT Jaya Raya Utama, Yayasan Pembangunan Jaya Raya, Yayasan Karyawan Tempo, serta publik. Sementara itu, Antaranews.com berada di bawah naungan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antaranews, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga secara tidak langsung memiliki keterkaitan dengan pemerintah Indonesia. Kepemilikan media juga menjadi faktor dalam bagaimana media membungkai sebuah berita,

sehingga media atau portal berita dapat menjadi alat untuk menguntungkan beberapa pihak atau kelompok tertentu. Media yang saat ini didominasi oleh banyak pengusaha dan politisi dapat menjadi alat dalam kepentingan tertentu (Fathurokhmah, 2021).

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif*, yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memaparkan data secara objektif, tanpa manipulasi, serta menekankan pada pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan ini umum digunakan dalam kajian ilmu sosial untuk menggambarkan realitas berdasarkan data yang diperoleh (Ramadhany, 2020). Dalam penelitian ini, metode *kualitatif deskriptif* dipilih untuk memahami cara media membungkai pemberitaan terkait dugaan korupsi yang melibatkan Tom Lembong. Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana makna dan interpretasi dibentuk melalui pemberitaan tersebut. Kerangka berpikir penelitian ini didasari oleh paradigma *konstruktivisme*, yang memandang realitas sosial sebagai konstruksi yang dibentuk melalui persepsi, pengalaman, dan interaksi antara individu dan kelompok (Ningrum, 2023).

Objek yang diteliti adalah pemberitaan mengenai kasus dugaan korupsi yang melibatkan Tom Lembong, terkait kebijakan impor gula pada tahun 2015. Berita yang dianalisis berasal dari dua portal berita online, yakni Antaranews.com dan Tempo.co, dengan periode pemberitaan yang dibatasi antara 29 Oktober hingga 30 November 2024. Periode tersebut dipilih berdasarkan peningkatan tren pencarian masyarakat terhadap isu ini, yang diperoleh dari *Google Trend* dengan kata kunci “Tom Lembong”. Dari hasil pencarian tersebut, terkumpul 51 berita dari Antaranews.com dan 154 berita dari Tempo.co. Data tersebut kemudian diseleksi berdasarkan empat tahapan utama dalam pemberitaan kasus ini, yaitu penetapan tersangka, respons politisi, praperadilan dan dugaan *politisasi*, serta penolakan praperadilan. Proses seleksi ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis tetap relevan dengan tujuan penelitian. Pemilihan berita didasarkan pada kekuatan *framing* yang paling menonjol dalam setiap tahap pemberitaan.

Dari proses seleksi tersebut, dipilih lima berita dari Antaranews.com dan enam berita dari Tempo.co yang relevan dengan tahapan-tahapan penting dalam kasus ini. Pemilihan kedua portal berita ini didasari oleh konsistensi dalam memberitakan perkembangan kasus Tom Lembong, serta perbedaan dalam cara mereka menyajikan isu yang sama. Perbedaan ini juga terkait dengan kepemilikan media, dimana Antaranews.com berada di bawah naungan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN), yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga memiliki hubungan struktural dengan pemerintah Indonesia. Sementara itu, Tempo.co lebih independen, dimiliki oleh beberapa perusahaan melalui saham di PT Grafiti Pers, dengan pemegang saham di antaranya Yayasan Tempo 21 Juni 1994, PT Jaya Raya Utama, Yayasan Pembangunan Jaya Raya, Yayasan Karyawan Tempo, serta publik. Hasil seleksi berita akan dianalisis menggunakan metode *analisis framing* dari Robert Entman. *Framing* adalah proses seleksi yang mengedepankan aspek-aspek tertentu dari realitas sosial, yang memungkinkan untuk menonjolkan bagian tertentu dibandingkan yang lainnya. Metode *analisis framing* Robert Entman terdiri dari empat komponen utama: Define Problem (Menentukan Masalah), dalam komponen ini penelitian akan melihat bagaimana media memaknai dan memposisikan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Tom Lembong. Komponen ini krusial karena menentukan fokus isu yang diangkat dalam pemberitaan.

Penelitian ini akan mengidentifikasi bagaimana media menggambarkan kasus tersebut dan bagaimana gambaran tersebut membentuk pemahaman audiens. Setiap media memiliki cara yang berbeda dalam membungkai realitas, yang dapat memunculkan pemahaman yang berbeda terhadap peristiwa yang sama. Komponen Kedua *Diagnose Causes* (Menentukan Penyebab), di sini peneliti akan mengidentifikasi siapa atau apa yang dianggap sebagai penyebab utama dalam kasus yang diberitakan. Fokus analisis akan mengarah pada narasi yang dibangun oleh media terkait peran aktor-aktor tertentu dalam kasus korupsi yang melibatkan Tom Lembong. Peneliti akan mengeksplorasi bagaimana media menggambarkan peran aktor-aktor kunci dalam kasus ini. Komponen Ketiga *Make Moral Judgment* (Menentukan Penilaian Moral), pada

komponen ini peneliti akan menganalisis bagaimana media membangun penilaian moral terhadap peristiwa yang dilaporkan. Penelitian akan mengidentifikasi apakah narasi yang dibangun oleh media cenderung mendukung atau mengecam isu tersebut, serta bagaimana media membentuk moralitas dalam pemberitaan. Komponen Keempat *Treatment Recommendation* (Memberikan Solusi atau Penyelesaian), dalam komponen ini peneliti akan fokus pada bagaimana media memberikan solusi atau tindak lanjut atas isu yang diangkat. Peneliti akan menganalisis apakah media menawarkan rekomendasi dalam menyelesaikan atau merespons masalah tersebut (Setiaji, 2014). Setelah melakukan *analisis framing* terhadap pemberitaan, peneliti akan mengaitkan temuan tersebut dengan teori *relasi kuasa* yang dikemukakan oleh Michel Foucault. Dalam konteks ini, teori *relasi kuasa* digunakan untuk memahami bagaimana kekuasaan bekerja dalam media, terutama dalam proses *framing* berita (Syahputra, 2017). Dalam pemberitaan kasus dugaan korupsi Tom Lembong, teori ini membantu untuk mengidentifikasi bagaimana media berperan dalam membentuk wacana publik mengenai siapa yang memegang kekuasaan dan siapa yang dirugikan, serta bagaimana narasi ini diproduksi dan disebarluaskan.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Framing Berita Antaranews.com dan Tempo.co atas Penetapan Tersangka Tom Lembong Dalam pemberitaan mengenai penetapan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong, Antaranews.com memuat berita dengan judul "Kejagung: Penetapan Tersangka Tom Lembong Murni Penegakan Hukum", sementara Tempo.co menerbitkan berita berjudul "Tom Lembong Jadi Tersangka Korupsi, Pengamat: Politisasi Hukum Bakal Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi". Penelitian menunjukkan perbedaan signifikan dalam cara kedua media membungkai isu ini. Antaranews.com lebih menekankan aspek legalitas dari tindakan Kejaksaan Agung, menggambarkan langkah tersebut sebagai bentuk penegakan hukum yang sah dan objektif. Sebaliknya, Tempo.co menyoroti potensi politisasi yang melatarbelakangi penetapan tersangka, dengan fokus pada pandangan

pengamat yang mencemaskan dampak politis terhadap ekonomi negara. Dalam *diagnose causes* (penentuan penyebab), kedua media menunjukkan perbedaan framing yang jelas. Antaranews.com menggambarkan penyebab masalah sebagai hasil dari proses penyidikan yang objektif oleh Kejaksaan Agung, yang dimulai sejak Oktober 2023. Proses tersebut digambarkan bebas dari campur tangan politik, dengan penekanan pada langkah hukum yang sah. Sementara itu, Tempo.co mengaitkan penyebab masalah dengan kerentanan sistem hukum Indonesia, yang berpotensi dimanfaatkan sebagai alat politik untuk menyerang lawan-lawan kekuasaan. Dalam *make moral judgment* (penilaian moral), perbedaan framing menjadi semakin jelas. Antaranews.com membingkai tindakan Kejaksaan Agung sebagai langkah yang sah, profesional, dan bebas dari pengaruh politik, dengan kutipan resmi yang menegaskan bahwa proses penyidikan berdasarkan bukti yang kuat. Di sisi lain, Tempo.co membangun penilaian moral yang lebih kritis dengan menyoroti potensi politisasi hukum, serta mengungkapkan kekhawatiran terhadap kriminalisasi tokoh politik yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi negara. Pada *treatment recommendation* (rekomendasi penyelesaian), kedua media juga memiliki pendekatan yang berbeda. Antaranews.com lebih menekankan penyelesaian kasus melalui prosedur hukum yang telah ditetapkan, dengan fokus pada langkah Kejaksaan Agung yang menahan Tom Lembong selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Sebaliknya, Tempo.co menekankan pentingnya perubahan sistem hukum agar tidak dipolitisasi, serta perlunya transparansi dalam proses hukum untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.

Framing Berita Antaranews.com dan Tempo.co atas Respon Politisi Terkait Penetapan Tersangka Tom Lembong

Pemberitaan mengenai respon politisi terhadap kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong menunjukkan perbedaan mencolok antara kedua media. Antaranews.com memuat dua berita berjudul "Zulhas Sebut Dukung Proses Hukum Soal Tom Lembong" dan "Terkait Tom Lembong, Mahfud MD: Dua unsur telah terpenuhi". Tempo.co, di sisi lain, menerbitkan dua berita berjudul "Tom Lembong Jadi Tersangka, Anies Singgung Indonesia

Bukan Negara Kekuasaan" dan "Loyalis Anies, Geisz Chalifah, Yakin Tom Lembong Tidak Korupsi". Dalam *define problem* (penentuan masalah), Antaranews.com menggambarkan penetapan tersangka sebagai bagian dari proses hukum yang sah, didukung oleh pernyataan dari Zulkifli Hasan dan Mahfud MD yang menegaskan bahwa dua unsur pidana telah terpenuhi. Sementara itu, Tempo.co menyoroti potensi penyalahgunaan proses hukum, dengan pernyataan Anies Baswedan dan loyalisnya Geisz Chalifah yang mempertanyakan motif politik di balik penetapan tersangka tersebut. Dalam *diagnose causes* (penentuan penyebab), perbedaan narasi semakin terlihat. Antaranews.com menggambarkan penetapan tersangka sebagai hasil dari proses penyidikan yang sah, yang didasari oleh bukti yang cukup meskipun tanpa aliran dana langsung. Sebaliknya, Tempo.co mengaitkan penetapan tersangka dengan adanya motif politik, mengingat Tom Lembong merupakan bagian dari tim pemenangan Anies-Muhaimin dalam Pemilihan Presiden 2024. Penulisan ini mempertegas narasi bahwa proses hukum berpotensi dipolitisasi.

Pada *make moral judgment* (penilaian moral), kedua portal berita memperlihatkan perbedaan signifikan. Antaranews.com membingkai penetapan tersangka Tom Lembong sebagai langkah hukum yang sah, berlandaskan pada proses hukum yang harus dihormati. Tempo.co, sebaliknya, menyoroti penetapan tersangka sebagai langkah yang dipengaruhi oleh kepentingan politik, dengan mengutip pernyataan dari Anies Baswedan yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Pernyataan mengenai integritas Tom Lembong diperkuat dengan kesan bahwa penetapan tersangka tersebut mengandung muatan politis. Pada *treatment recommendation* (rekomendasi penyelesaian), Antaranews.com menekankan bahwa proses hukum harus diteruskan sesuai prosedur yang ada, dengan mendukung pernyataan dari Zulkifli Hasan dan Mahfud MD yang mengungkapkan bahwa dua unsur pidana telah terpenuhi. Sebaliknya, Tempo.co lebih menekankan pentingnya transparansi dalam proses hukum untuk menghindari adanya kepentingan politik di baliknya. Dalam pemberitaan Tempo.co, terdapat seruan untuk memperhatikan sistem hukum agar lebih terbuka dan adil bagi semua pihak.

Framing Berita Antaranews.com dan Tempo.co atas Praperadilan dan Dugaan Politisasi Terkait Penetapan Tersangka Tom Lembong

Pada pemberitaan mengenai praperadilan dan dugaan *politisasi* terkait kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong, Antaranews.com memuat berita dengan judul "Kejagung Tegaskan Penanganan Perkara Tom Lembong Sesuai Hukum", sedangkan Tempo.co menerbitkan dua berita berjudul "Tom Lembong Ajukan Praperadilan: Tak Ada Bukti Cukup, Kejagung Sewenang-wenang" dan "6 Saksi Ahli Tom Lembong Sebut Penetapan Tersangka Prematur dan Tidak Ada Kerugian Negara". Hasil analisis dalam *define problem* (penentuan masalah) menunjukkan perbedaan mencolok dalam cara kedua media membingkai isu ini. Antaranews.com lebih menekankan penetapan tersangka Tom Lembong sebagai tindakan yang sah dari Kejaksaan Agung, mengonfirmasi bahwa proses hukum telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, Tempo.co melihat hal ini sebagai potensi pelanggaran prosedural dalam penetapan tersangka, yang dinilai sewenang-wenang. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan tim kuasa hukum Tom Lembong yang mengajukan praperadilan, serta pandangan enam saksi ahli yang hadir dalam proses praperadilan, yang menilai tindakan Kejaksaan Agung terlalu terburu-buru dan tidak didukung bukti yang cukup.

Dalam *diagnose causes* (penentuan penyebab), kedua media menggunakan pendekatan yang berbeda. Antaranews.com mengaitkan penyebab masalah dengan keputusan Tom Lembong saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan yang mengeluarkan izin impor gula kepada perusahaan swasta, yang dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dipandang sebagai langkah hukum yang sah, meskipun terdapat tuduhan politisasi. Sebaliknya, Tempo.co menyoroti adanya dugaan pelanggaran prosedural dalam penetapan tersangka, dengan mempertanyakan legalitas proses penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung. Tempo.co juga mencatat tidak adanya audit resmi yang mendasari penyidikan, serta ketidakcukupan bukti permulaan yang dijadikan dasar hukum. Dalam *make moral judgment* (penilaian moral), kedua media membangun narasi yang berbeda. Antaranews.com menggambarkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga

yang menjalankan proses hukum secara sah, objektif, dan sesuai prosedur. Pemberitaan ini menekankan pernyataan resmi Kejaksaan Agung yang menyatakan bahwa proses penyidikan dilakukan berdasarkan bukti yang kuat, tanpa ada pengaruh politik. Di sisi lain, Tempo.co membangun penilaian moral yang lebih kritis, menggambarkan Tom Lembong sebagai korban dari proses hukum yang tidak sah dan sewenang-wenang. Ini tercermin dalam pernyataan tim kuasa hukum dan enam saksi ahli yang menilai kebijakan impor gula yang diambil oleh Tom Lembong sebagai langkah yang tepat, tanpa kerugian negara. Tempo.co juga mempertanyakan kejanggulan penetapan tersangka yang terjadi satu dekade setelah kebijakan tersebut, yang memunculkan keraguan atas integritas proses hukum. Pada *treatment recommendation* (rekomendasi penyelesaian), kedua media menunjukkan pendekatan yang berbeda. Antaranews.com menekankan penyelesaian kasus melalui jalur hukum yang prosedural dan profesional, dengan menyoroti komitmen Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus ini sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, Tempo.co menekankan perlunya transparansi dalam proses hukum dan mendesak evaluasi yang lebih mendalam agar proses hukum tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik. Tempo.co juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap proses hukum agar tetap adil dan menjaga kepercayaan publik.

Framing Berita Antaranews.com dan Tempo.co atas Penolakan Praperadilan Dugaan Kasus Korupsi Tom Lembong

Pemberitaan mengenai penolakan praperadilan terkait kasus dugaan korupsi impor gula yang melibatkan Tom Lembong menunjukkan perbedaan penting antara kedua media. Antaranews.com mengangkat berita berjudul "Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Tom Lembong Terkait Impor Gula", sedangkan Tempo.co memuat berita dengan judul "Praperadilan Ditolak, Tom Lembong: Saya Akan Terus Berjuang Mengungkap Kebenaran dan Keadilan". Pada *define problem* (penentuan masalah), kedua media sama-sama mengangkat isu penolakan hakim terhadap praperadilan Tom Lembong, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Antaranews.com menekankan pada legitimasi keputusan hakim dan kelanjutan proses hukum, sedangkan Tempo.co membingkai penolakan

praperadilan sebagai bagian dari perjuangan Tom Lembong dalam mencari keadilan. Tempo.co lebih menyoroti pernyataan langsung dari Tom Lembong yang berkomitmen untuk terus berjuang mengungkap kebenaran meskipun praperadilan ditolak. Dalam *diagnose causes* (penentuan penyebab), kedua media membingkai penyebab masalah dengan cara yang berbeda. Antaranews.com mengaitkan penyebabnya dengan keputusan Tom Lembong yang memberi izin impor gula kristal mentah kepada perusahaan swasta, yang dianggap melanggar aturan hukum yang hanya memperbolehkan impor oleh perusahaan BUMN. Sebaliknya, Tempo.co menyoroti penolakan praperadilan sebagai ketidakadilan dalam proses hukum yang dinilai menyimpang dari prosedur yang benar, dengan fokus pada ketidaksetujuan tim kuasa hukum yang mempertanyakan keabsahan proses penyidikan. Pada *make moral judgment* (penilaian moral), Antaranews.com membangun narasi yang menguatkan posisi Kejaksaan Agung dan keputusan hakim sebagai penegakan hukum yang sah dan objektif. Narasi ini mendukung bahwa penolakan praperadilan adalah langkah yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sebaliknya, Tempo.co menyoroti Tom Lembong sebagai sosok yang memperjuangkan keadilan, dengan narasi yang lebih mendalam tentang ketidakadilan yang terjadi. Pemberitaan ini memperkuat bahwa proses hukum harus tetap terbuka untuk kritik agar tidak menjadi alat politik. Dalam *treatment recommendation* (rekomendasi penyelesaian), Antaranews.com menekankan pada kelanjutan proses hukum sebagai langkah yang sah dan sesuai ketentuan yang ada. Berbeda dengan Tempo.co yang menyoroti tekad Tom Lembong untuk terus berjuang mencari keadilan, serta pentingnya evaluasi terhadap sistem hukum agar lebih adil dan transparan. Tempo.co menggarisbawahi perlunya pengawasan yang ketat agar proses hukum tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Relasi Kuasa dalam Jaringan Media Antaranews.com dan Tempo.co

Dari hasil analisis *framing*, Antaranews.com secara konsisten membingkai pemberitaan dengan menekankan pada legalitas tindakan Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi Tom Lembong. Sebagai media di bawah naungan BUMN,

Antaranews.com memiliki kedekatan struktural dengan pemerintah, sehingga narasi yang dibangun lebih memperkuat posisi dan legitimasi lembaga negara. Dalam konteks *relasi kuasa*, Antaranews.com tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga berperan dalam membentuk pandangan publik terhadap realitas sosial. Melalui pemberitaan yang dibangun, Antaranews.com mendukung langkah Kejaksaan Agung, dengan persepsi bahwa proses hukum berjalan secara sah dan bebas dari kepentingan politik. Sebaliknya, Tempo.co, yang lebih independen dalam hal kepemilikan, membingkai kasus ini sebagai bagian dari dinamika politik yang lebih kompleks. Dengan struktur kepemilikan yang lebih terbuka, Tempo.co dapat membangun narasi yang lebih kritis terhadap pemerintah, membuka ruang untuk mempertanyakan motif politik yang mungkin ada di balik proses hukum. Dalam *relasi kuasa*, Tempo.co memiliki peran penting dalam membentuk realitas sosial yang menentang kebenaran tunggal yang berasal dari posisi struktural dan pengaruh pemerintah, dengan *framing* yang mempertanyakan proses hukum yang dihadapi Tom Lembong.

Pembahasan

Dalam analisis *framing* pemberitaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Tom Lembong, baik Antaranews.com maupun Tempo.co menunjukkan perbedaan yang jelas dalam menyajikan narasi terkait penetapan tersangka dan respons politisi. Antaranews.com lebih fokus pada legalitas tindakan Kejaksaan Agung dan menekankan bahwa proses hukum yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebaliknya, Tempo.co mengkritisi potensi politisasi yang melatarbelakangi penetapan tersangka, dengan memberi ruang bagi pandangan pengamat yang mempertanyakan motif politik di balik langkah hukum tersebut. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana kepemilikan media dan kedekatan mereka dengan pihak berkuasa memengaruhi *framing* yang dibangun dalam pemberitaan. Antaranews.com, yang berada di bawah naungan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), cenderung lebih memperkuat legitimasi tindakan pemerintah, sejalan dengan temuan dalam penelitian Sari *et al.* (2025) yang menunjukkan bahwa media yang terkait dengan pemerintah lebih menekankan penegakan hukum yang sah dan bebas dari politisasi.

Di sisi lain, Tempo.co, yang lebih independen, menunjukkan kecenderungan untuk mengkritisi dinamika politis yang melatarbelakangi proses hukum, yang juga tercermin dalam penelitian Prayogi dan Chandra (2024), yang mengungkapkan bahwa media independen sering kali lebih kritis terhadap politisasi dalam pemberitaan. Dalam *diagnose causes* (penentuan penyebab), kedua media menunjukkan perbedaan framing yang signifikan. Antaranews.com mengaitkan penyebab masalah dengan keputusan Tom Lembong saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan yang mengeluarkan izin impor gula kepada perusahaan swasta, yang dianggap melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, Tempo.co menyoroti dugaan pelanggaran prosedural dalam penetapan tersangka, dengan mempertanyakan legalitas proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Penelitian sebelumnya oleh Ananya dan Ramadhana (2024) juga menunjukkan bahwa media yang lebih dekat dengan pemerintah cenderung menggambarkan masalah dengan lebih objektif, sementara media yang lebih independen memberikan sorotan pada kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses hukum.

Dalam *make moral judgment* (penilaian moral), Antaranews.com menggambarkan Kejaksaan Agung sebagai lembaga yang menjalankan proses hukum yang sah, objektif, dan sesuai prosedur, dengan menegaskan bahwa proses penyidikan dilakukan berdasarkan bukti yang kuat, tanpa ada pengaruh politik. Sebaliknya, Tempo.co membangun penilaian moral yang lebih kritis, menggambarkan Tom Lembong sebagai korban dari proses hukum yang tidak sah dan sewenang-wenang. Ini memperkuat narasi yang dipertanyakan dalam penelitian Fathurokhmah (2021), yang mengungkapkan bahwa media yang independen cenderung lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan mengangkat isu ketidakadilan dalam proses hukum. Tempo.co juga lebih menekankan pentingnya transparansi dalam *treatment recommendation* (rekомendasi penyelesaian), mengusulkan perlunya evaluasi terhadap sistem hukum untuk menghindari penyalahgunaan. Sebaliknya, Antaranews.com lebih menekankan jalur hukum yang sah dan keberlanjutan proses penyidikan yang sudah dilakukan Kejaksaan Agung. Perbandingan ini menunjukkan bagaimana kedua

media memandang solusi terhadap permasalahan hukum yang berbeda berdasarkan struktur dan ideologi mereka. Penelitian ini juga memperlihatkan relevansi dengan penelitian terdahulu. Misalnya, Djuwita (2016) dalam penelitiannya mengenai framing media terhadap politisi perempuan dalam kasus korupsi menunjukkan bahwa media sering membungkai kasus tersebut berdasarkan gender, dengan kecenderungan menyoroti aspek pribadi politisi perempuan. Dalam hal ini, perbedaan framing yang ditunjukkan oleh Antaranews.com dan Tempo.co dalam pemberitaan kasus Tom Lembong sejalan dengan temuan tersebut, di mana Antaranews.com lebih fokus pada aspek hukum, sementara Tempo.co lebih menyoroti dinamika politik di balik kasus tersebut. Selain itu, penelitian oleh Setiaji (2014) mengenai framing media pada kasus terorisme juga relevan dalam hal bagaimana media dapat membentuk persepsi publik dengan memilih sudut pandang yang berbeda, yang dalam kasus ini, tergantung pada hubungan media dengan pihak-pihak yang berkuasa. Analisis framing terhadap pemberitaan kasus dugaan korupsi Tom Lembong menunjukkan bahwa kedua media membungkai peristiwa dengan cara yang sangat dipengaruhi oleh kepemilikan dan kedekatan mereka dengan struktur kekuasaan. Media seperti Antaranews.com, yang berafiliasi dengan pemerintah, lebih cenderung untuk memperkuat legitimasi dan proses hukum yang sah, sementara Tempo.co, yang lebih independen, mempertanyakan proses hukum tersebut dan lebih menekankan pada potensi politisasi. Perbedaan ini menggarisbawahi bagaimana media dapat membentuk pandangan publik melalui framing yang mereka pilih, serta menunjukkan pentingnya transparansi dalam proses hukum agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang bagaimana kekuasaan dan kepemilikan media memengaruhi framing dalam pemberitaan kasus hukum yang melibatkan tokoh politik.

4. Kesimpulan dan Saran

Dalam pemberitaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Tom Lembong terkait impor gula, Antaranews.com dan Tempo.co menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam cara mereka

membingkai pemberitaan. Antaranews.com secara konsisten menekankan pada legalitas tindakan Kejaksaan Agung, dengan menonjolkan aspek prosedural dan memperkuat legitimasi proses hukum melalui pernyataan resmi dari lembaga hukum tersebut. Pemilihan narasumber yang mendukung pandangan ini, serta sudut pandang yang lebih mengarah pada penguatan posisi Kejaksaan Agung, mencerminkan keterkaitan Antaranews.com dengan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) yang berada di bawah naungan BUMN, dan secara tidak langsung dekat dengan struktur pemerintahan. Hal ini memengaruhi framing yang dibangun, yang lebih cenderung untuk mendukung keberlanjutan proses hukum yang sah dan objektif.

Sebaliknya, Tempo.co, sebagai media yang lebih independen dengan kepemilikan berbasis saham swasta dan publik, mengadopsi pendekatan yang lebih kritis dan terbuka terhadap proses hukum yang terjadi. Kepemilikan yang memberikan ruang redaksi yang lebih bebas memungkinkan Tempo.co untuk menghadirkan narasi yang mempertanyakan adanya motif politik yang melatarbelakangi penetapan tersangka terhadap Tom Lembong. Dengan memilih narasumber yang tidak terikat pada narasi resmi, Tempo.co memperlihatkan bagaimana pemberitaan ini dibangun dengan mempertimbangkan konteks politik yang lebih luas, bukan hanya sekedar mengulas aspek prosedural dalam kasus hukum yang sedang berlangsung. Hal ini menunjukkan bagaimana struktur kepemilikan media dapat memengaruhi framing dalam pemberitaan, dengan media independen lebih berani mengeksplorasi dimensi politik di balik peristiwa hukum.

Mengingat perbedaan framing yang muncul antara media dengan kepemilikan yang berbeda, penting bagi masyarakat untuk lebih kritis dalam mengonsumsi berita dan memahami bagaimana berbagai faktor, seperti kepemilikan media dan afiliasi politik, dapat mempengaruhi sudut pandang dalam pemberitaan. Sebagai langkah ke depan, disarankan agar media-media dengan latar belakang yang berbeda memperluas ruang diskursus dengan menghadirkan beragam perspektif yang lebih seimbang, sehingga publik mendapatkan gambaran yang lebih holistik dan objektif terkait isu-isu hukum dan politik yang berkembang. Selain itu, penguatan

transparansi dalam proses hukum dan media yang lebih berfokus pada fakta dan data dapat memperkuat integritas informasi yang disampaikan kepada publik.

5. Daftar Pustaka

- Alrizki, D., & Aslinda, C. (2022). Analisis Framing Pemberitaan Indonesia Tidak Lockdown di kompas. com dan detik. com. *Journal of Political Communication and Media*, 1(01), 24-36.
- Arini, M. K. (2025). Analisis Yuridis Normatif Pemberian Abolisi oleh Presiden Terhadap Kasus Impor Gula Tom Lembong. *Mutiara: Multidisciplinary Scientifict Journal*, 3(8), 751-759. <https://doi.org/10.57185/mutiara.v3i8.421>.
- Barasa, M. S., & Riyanto, F. A. (2023). Analisis Teori Kekuasaan Michel Foucault atas Propaganda Media dalam Membangun Diskursus Politik. *Malang: Journal of Education, Humanities and Social Sciences*, 6(1), 188-195.
- Cahyaningrum, D. *Analisis Framing Robert Entman Pada Pemberitaan Cuti Melahirkan Dalam Undang-Undang Kesejahteraan Ibu Dan Anak di Media Online Kompas. Com* (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Darmadi, D. (2022). RELASI KUASA MEDIA, NEGARA DAN ULAMA DALAM NARASI TESTIMONIAL ULAMA DAYAH TERHADAP VAKSINASI MASYARAKAT ACEH.
- Djuwita, A., & Batu, T. B. (2016). Politisi perempuan dalam bingkai media (Analisis framing Robert Entment atas pemberitaan politisi perempuan di media cetak). *Jurnal Komunikasi UAD*, 4(1).
- Fathurokhmah, F. (2021). Lanskap dinamika kekuasaan industri media di Indonesia: Perspektif politik dan ekonomi. *Jurnal Ilmu Komunikasi (JKMS)*, 10(1), 67-84.
- Hidayah, S., & Nugroho, A. S. (2025). Pemberian Amnesti Dan Abolisi Dalam Tindak Pidana

- Korupsi: Tinjauan Hukum Dan Analisis Keadilan Prosedural. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 13-20. <https://doi.org/10.61476/9xb5bh53>.
- ICW, M. P. (2023). Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022.
- Kasman, M. (2025). Tuduhan Pelanggaran Wewenang dalam Kasus Korupsi Tom Lembong: Perspektif Hukum. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(3), 168-176. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i3.475>.
- McQuail, D., & Deuze, M. (2020). McQuail's media and mass communication theory.
- Selasdi, R. (2021). *Analisis Framing Robert N. Entman Pemberitaan Vaksinasi Covid-19 Di Media Online Tribunpekanbaru. Com* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Setiaji, K., Triyono, A., & Sos, S. (2014). *Terorisme Dalam Bingkai Media (Analisis Framing Pemberitaan Terorisme di Surakarta pada Headline Koran Solopos Edisi Agustus-September 2012)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Syahputra, I. (2017). Post media literacy: Menyaksikan kuasa media bersama Michel Foucault. *Jurnal Aspikom*, 1(1), 1-14.
- Yani, A. (2025). Framing dan Objektivitas Pemberitaan Kasus Hasto Kristiyanto: Analisis Media di Kompas. com. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(1), 34-39. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6933>.